

Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Katastropik Pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan Yang Kredibel

Dalam rapat antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran pada tanggal pada tanggal 4 September 2018, Kementerian Keuangan mengajukan RAPBN 2019 di sektor kesehatan sebesar **Rp121,9 triliun** yang terdiri dari **Rp88,2 triliun yang berasal dari Belanja Pusat** dan **Rp33,7 triliun Transfer Daerah**. Khusus untuk Belanja Pusat, **anggaran untuk Kemenkes diajukan sebesar Rp58,7 triliun**. Jika anggaran tersebut disetujui, maka anggaran untuk Kemenkes meningkat sebesar 28% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp45,9 triliun. Salah satu pos yang harus mendapat perhatian adalah pada **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** yang masuk dalam program strategis RPJMN 2015-2019. Apabila mengkaji kinerja Kemenkes di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, diperoleh data sebagai berikut :

Gambar 1. Target Indikator Kinerja Ditjen P2P yang terkait dengan RPJMN 2015-2019

Indikator	2015		2016		2017		2018		2019	KET
	Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian*)	Target	
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	280	263	271	257	262	254	254	Data tahunan	245	
2. Prevalensi HIV (persen)	<0,5	0,33	<0,5	0,33	<0,5	0,33	<0,5	Data tahunan	<0,5	
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	21	21	23	23	25	24	26	24	34	
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	225	232	245	247	265	266	285	272	300	
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis	9	17	12	22	15	28	24	29	35	
6. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,28	NA	24,77	32,4	24,28	32,4	23,79	Data survei	23,38	
7. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4	NA	15,4	20,7	15,4	20,7	15,4	Data survei	15,4	
8. Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun	6,9	NA	6,4	8,8	5,9	8,8	5,6	Data survei	5,4	
9. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	75	66	80	80,7	85	85,4	90	Data tahunan	95	

Sumber: Bahan Paparan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (2018)

Gambar 1 menunjukkan 9 indikator Ditjen P2P yang juga merupakan indikator pada RPJMN 2015-2019. Terlihat bahwa 3 indikator kinerja Ditjen P2P masih belum tercapai selama 2016-2017. Ketiga indikator tersebut adalah 1)Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (persen), 2)Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ tahun (persen), dan 3)Prevalensi merokok penduduk usia kurang dari sama dengan 18 tahun.

Pada indikator prevalensi tekanan darah tinggi diketahui bahwa prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2016 dan 2017 masih jauh dibawah target kinerja (semakin kecil persentasenya semakin bagus). **Pada tahun 2016 target kinerja prevalensi tekanan darah tinggi adalah sebesar 24,77 persen, sementara capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar 32,4 persen.** Pada tahun 2017 target prevalensi tekanan darah tinggi direncanakan untuk turun hingga 24,28 persen, namun capaian kinerja tahun 2017 tetap pada angka 32,4 persen.

Serupa dengan prevalensi darah tinggi, prevalensi obesitas pada usia 18 tahun keatas dan prevalensi merokok penduduk usia kurang dari sama dengan 18 tahun masih jauh dibawah target kinerja. **Pada tahun 2016 dan 2017 prevalensi obesitas pada usia 18 tahun keatas tetap statis pada angka 20,7 persen, sementara target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017 adalah 15,4 persen. Prevalensi**

merokok juga menunjukkan tren angka prevalensi yang statis selama 2016 dan 2017 yaitu sebesar 8,8 persen, padahal target yang ditetapkan adalah 6,4 persen pada 2016 dan 5,9 persen pada 2017.

Apabila pencegahan dan pengendalian tidak dilakukan secara maksimal, maka akan berdampak sistemik pada biaya pengobatan. Program Jaminan Kesehatan Negara (JKN) yang diorganisir BPJS yang defisit selama 3 tahun terakhir tidak lepas dari kurang optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Anggaran untuk BPJS 30% habis untuk pengobatan katastrofik seperti jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. **Penyakit tersebut sebagian besar muncul dari kebiasaan merokok, obesitas dan tekanan darah tinggi.** Selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif. Pada tahun 2014 defisit anggaran perusahaan publik itu mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Pada akhir 2018, BPJS Kesehatan diperkirakan akan menanggung defisit anggaran sebesar Rp16 triliun. Dampaknya adalah BPJS terpaksa menunggak biaya operasional rumah sakit seperti dokter, obat-obatan, dan lain-lain. Penyertaan penyakit katastrofik ke dalam penyakit yang ditanggung JKN memang baik, akan tetapi pemerintah harus waspada apabila jumlah pengidap penyakit tersebut lebih besar daripada pendapatan BPJS. Hal tersebut akan berpengaruh sistemik kepada kualitas hidup rakyat Indonesia dan menghambat pembangunan.

Sebagai langkah perbaikan kedepannya, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh DPR bersama pemerintah :

- DPR perlu mempertimbangkan kenaikan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tetapi juga mendorong efektivitas implementasinya;
- DPR perlu mengkaji opsi *cost sharing* atau berbagi biaya antara BPJS Kesehatan dengan industri rokok atau BPJS tidak mengcover sepenuhnya biaya pengobatan penyakit katastrofik tersebut.